

Vaksinasi di Indonesia Sampai 2023

SEMARANG (KR)- Proses vaksinasi di Indonesia diprediksi tidak akan bisa selesai tahun ini. Untuk mencapai herd immunity sebagaimana rekomendasi WHO, maka Indonesia diperkirakan membutuhkan waktu hingga tahun 2023. Sesuai rekomendasi dari WHO, untuk mencapai herd immunity, 70 persen populasi sebuah negara harus sudah divaksin. Untuk Indonesia, harus mencapai 183 juta penduduk.

Demikian dikatakan Wakil Ketua MPR RI yang juga selaku Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Ahmad Muzani, kepada wartawan di Semarang Rabu (17/3). Hingga sekarang vaksinasi di Indonesia baru menasar sekitar empat juta penduduk. "Sekitar dua juta penduduk sudah dua kali vaksin, dan yang dua juta penduduk lainnya baru di vaksin sekali. Jumlah empat juta itu masih terlalu jauh dibandingkan angka dari WHO 70 persen dari populasi, yaitu sekitar 183 juta penduduk," tutur Muzani.

Muzani mengatakan, harus diakui ada keterbatasan vaksin karena seluruh dunia sedang berlomba untuk mendapatkannya. Selain itu, ada keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah Indonesia. Untuk mempercepat proses vaksinasi, harus dilakukan langkah-langkah secara bersama agar segera menyelesaikan pandemi ini. WHO menyatakan, vaksin belum bisa mencegah penularan Covid-19, 100 persen. Namun, karena sampai saat ini belum ditemukan obat, maka vaksin menjadi pilihan terbaik. Untuk pencegahan penularan Covid-19 yang terbaik adalah penerapan protokol kesehatan dengan tepat. (Bdi)

Insentif Nakes RSUD Belum Dibayar

SALATIGA (KR) - Tenaga medis di RSUD Salatiga belum menerima hak insentif selama tiga bulan, yakni Oktober, November dan Desember 2020 dengan besaran Rp 1,9 miliar. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Salatiga, Sri Pamuji Eko S mengatakan jumlah nakes yang belum diberi hak insentifnya kurang lebih 200 orang. "Adat 200 orang nakes di RSUD insentifnya tertunda pembayarannya selama tiga bulan di akhir 20-20," jelas Sri Eko Pamuji kepada KR, Rabu (17/3).

Pembayaran insentif tersebut sudah dialokasikan di APBD 2021 dan masih menunggu pencairan. Insentif ini diambilkan dari Biaya Tidak Terduga (BTT) yang dikelola Dinas Kesehatan Kota Salatiga. Kabag Keuangan RSUD Salatiga, Widada mengatakan, saat ini sudah input data ke sistem untuk pencairan hak insentif para nakes dari hasil koordinasi, pada April 2021 bisa dicairkan. "Mudah-mudahan April 2021 insentif yang tertunda sudah bisa dibayarkan," kata Widada. (Sus)

PPKM Dicabut Warga Mulai Gelar Hajatan

PATI (KR) - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang mengatur penanganan Covid-19 di Kabupaten Pati belum dicabut. Namun sejumlah warga mulai menggelar pesta hajatan nikah atau sunatan dan mengundang tamu secara bebas. Banyaknya hajatan itu diakui warga Kecamatan Batangan, Gabus, Sukolilo, Dukuhseti, Cluwak dan Margoyoso. Webek, seorang seniman Wedarijaksa, juga minta agar pemerintah segera memberikan izin pentas hiburan agar para sehingga seniman yang sudah satu tahun tidak pentas bisa mendapat penghasilan.

Sementara itu, penggigit sosial di Pati, Alman Eko Daro mengingatkan bahwa sejumlah pemakaman dengan standar Covid-19, akhir-akhir ini mulai menurun. "Januari lalu ada 128 kasus. Tetapi mulai Februari sampai pertengahan Maret ini memang terjadi penurunan drastis kasus Covid-19. Dalam sepekan, sekarang hanya terjadi dua sampai 4 kasus," ungkapnya. (Cuk)

Pasar Sayur Cepogo Bakal Diperluas

BOYOLALI (KR) - Bupati Boyolali M Said Hidayat dan Wakil Bupati Boyolali Wahyu Irawan, beserta rombongan jajarannya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat meninjau beberapa lokasi proyek pembangunan pasar di Boyolali. Salah satu yang menjadi perhatian Bupati Said adalah pasar sayur yang berada di Kecamatan Cepogo, tepatnya berada di sebelah bekas Pasar Rakyat Cepogo.

Setiap harinya jalan depan Pasar Sayur Cepogo selalu mengalami kemacetan akibat antrean kendaraan pedagang yang keluar masuk pasar. Selain itu penumpang kendaraan terjadi karena transaksi jual beli sering dilakukan antar mobil ke mobil, sehingga memperparah kemacetan yang ada di lokasi.

Untuk menyelesaikan masalah kemacetan di lokasi itu, Said Hidayat merencanakan akan mempergunakan sebagian lahan bekas Pasar Rakyat Cepogo untuk dijadikan perluasan pasar sayur. Lahan yang dipergunakan adalah di sisi utara yang berdekatan dengan pasar sayur tersebut, sedangkan lahan yang berada di bagian selatan direncanakan akan dipergunakan untuk pembangunan ruang terbuka hijau. "Sehingga parkirnya tidak di jalan, semua dapat masuk, lalu lintas dapat berjalan dengan lancar," ungkap Said Hidayat, Rabu (17/3).

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali melalui Kabid Infrastruktur, Pembinaan dan Penataan Pedagang Aris Sulistyanto, menjelaskan bahwa sebagian lahan bekas Pasar Rakyat Cepogo yang digunakan akan dibangun menjadi satu los besar dan lahan parkir. Pembangunan tersebut diperkirakan akan menelan anggaran sebesar Rp 1,2 miliar dengan luas bangunan 1.192 meter persegi yang ditargetkan selesai pada akhir tahun 2021. Ditambahkan olehnya bahwa los besar yang dibangun pada perluasan pasar sayur ini tidak diperuntukkan bagi pedagang baru, melainkan hanya untuk pedagang lama. (*-1)



Bupati dan Wakil Bupati Boyolali meninjau Pasar Cepogo.

DPRD Grobogan Bentuk Pansus Tentang LKPJ Bupati



GEMA DPRD KAB. GROBOGAN

GROBOGAN (KR) - DPRD Grobogan, Kamis (18/3), membentuk Pansus I tahun 2021 tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Grobogan tahun anggaran 2020. Rapat dipimpin Ketua DPRD Agus Siswanto SSoS, dihadiri Bupati Grobogan Hj Sri Sumarni SH MM, Forkopimda Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Purwodadi, Sekretaris Daerah dan segenap jajaran Eksekutif, Ketua dan Sekretaris KPUD setempat.

"Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 71 ayat 3, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 pasal 20 ayat 1 dan 2 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka DPRD wajib membahas LKPJ Bupati dalam waktu 30 hari untuk memberikan catatan dan rekomendasi

dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan. Dengan dasar inilah DPRD membentuk Pansus. Ada 15 anggota Pansus yang berasal dari perwakilan masing-masing fraksi. Sebagai Ketua H Musapak SH dan wakil H Firman Tri H Sfarm Apk," ujar Agus Siswanto.

Sebelum dibentuk Pansus, bupati menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran 2020. Antara lain tentang pelaksanaan pembangunan dan realisasi APBD 2020. Di jelaskan bupati, bencana pandemi Covid-19 di awal tahun 2020 membuat kebijakan keuangan daerah mengalami perubahan dari yang telah direncanakan sebelumnya dalam RKPd 2020. Refocussing dan realokasi anggaran perlu dilakukan sebagai bentuk respon Pemerintah Kabupaten Grobogan

dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.

Anggaran belanja 2020 disebutkan dialokasikan untuk penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp 124.192.510.913 yang digunakan untuk menangani 2 prioritas. Yaitu penanganan kesehatan, dialokasikan sebesar Rp 77.002.514.913, terealisasi sebesar 92,54 %. Kemudian untuk penanganan dampak ekonomi, dialokasikan anggaran sebesar Rp 47.189.996.000 terserap sebesar 99,16 %.

Mengenai realisasi APBD 2020, target pendapatan sebesar Rp 2.525.449.733.-189, terealisasi sebesar 100,11 %, dengan komposisi Pendapatan Asli Daerah sebesar 13,84 %, Dana Perimbangan 59,70 %, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 26,46 %. Alokasi belanja daerah sebesar Rp.2.612.667.067.943, tere-

alisasi sebesar 96,12 %, dengan komposisi Belanja Tidak Langsung sebesar 61,03 % dan Belanja Langsung 38,97 % dari total realisasi belanja daerah. Berdasarkan perhitungan realisasi APBD tahun 2020, jelas bupati, terdapat surplus sebesar Rp 17.076.014.367, dan Pembiayaan Netto sebesar Rp 86.103.674.404, sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp 103.179.688.771.

Tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah selama tahun 2020,

Pemkab Grobogan melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan, dengan anggaran Rp 1.023.247.956.598, terealisasi 95,64 %.

Pemkab Grobogan tahun 2020 menerima tugas pembantuan dari Pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, serta dari Pemerintah Provinsi Jateng sebesar Rp 15.966.267.000, terserap 98,93%. (Tas)



Rapat Paripurna ke-6 DPRD Grobogan tentang penyampaian LKPJ bupati tahun anggaran 2020.

KENDATI PERTUMBUHAN PENDUDUK RENDAH

Predikat Kota Terpadat Tak Terhindarkan

SOLO (KR) - Kendati pertumbuhan penduduk relatif rendah, namun Kota Solo tercatat sebagai kota terpadat di Jateng, bahkan jauh di atas kota lain yang menduduki ranking di bawahnya.

Tingkat kepadatan penduduk di Solo berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) tercatat 11.353 jiwa per kilometer persegi, sedangkan Kota Magelang yang berada satu tingkat di bawahnya, tingkat kepadatan sebesar 7.361 jiwa per kilometer persegi.

"Tingkat kepadatan penduduk seperti itu sulit dihindari," ungkap Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil), Yohanes Pramono, Kamis

(18/3) di Balaikota. Pasalnya, luas wilayah Kota Solo hanya 44,04 ribu kilometer persegi, sedangkan jumlah penduduk sejak beberapa tahun lalu cukup tinggi.

Ini terkait dengan posisi Kota Solo yang menjadi hinterland serta aktivitas ekonomi dan sosial daerah kabupaten sekitar, seperti Sukoharjo, Karanganyar, Boyolali, Klaten, Sragen, dan Wonogiri.

Kalau dari sisi pertumbuhan penduduk di Kota Solo, menurut

Pramono, dalam beberapa tahun terakhir sebenarnya relatif kecil, rata-rata sekitar 6 ribu jiwa per tahun. Pertumbuhan penduduk ini, dihitung dari selisih antara kelahiran dan kematian, serta mutasi penduduk yang pindah luar kota maupun datang.

Jika mengacu pada data akhir tahun 2020 yang telah terverifikasi, tingkat kepadatan penduduk Kota Solo tidak hanya 11.353 jiwa per kilometer persegi sebagaimana dilansir BPS, tetapi akan lebih tinggi lagi, sebab jumlah penduduk mencapai 578.350 jiwa.

Tinggal dihitung saja, jumlah

penduduk sebanyak 578.350 jiwa dibagi luas wilayah 44,04 kilometer persegi, akan ketemu tingkat kepadatan sebesar 13.143 jiwa per kilometer persegi.

Sementara Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Purwanti, terpisah menambahkan, angka kelahiran yang menjadi salah satu indikator pertumbuhan penduduk, dari tahun ke tahun cenderung menurun.

Seperti terjadi pada tahun 20-20, angka kelahiran sekitar 9.634 bayi atau turun dibanding tahun sebelumnya yang tercatat 7.737 bayi. (Hut)

Tingkatkan Disiplin Berlalu Lintas



Informasi kejadian laka lantas selama Februari 2021.

KEBUMEN (KR) - Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk selalu tertib dan disiplin berlalu lintas, dilakukan jajaran Satlantas Polres Kebumen. Seperti memajang informasi kejadian kecelakaan lalu lintas (laka lantas) dalam sebulan terakhir di sejumlah lokasi strategis. Kapolres Kebumen AKBP Piter Yantama melalui Kasubag Humas Polres

Iptu Tugiman, menyampaikan pemasangan informasi yang berisi data laka lantas, untuk mengingatkan masyarakat akan pentingnya tertib dan disiplin berlalu lintas. "Agar masyarakat lebih berhati-hati dan waspada, taat pada peraturan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas," tegas Iptu Tugiman, Rabu (17/3). Informasi kejadian laka lantas selama Februari 2021, seperti yang sudah dipasang di Simpang 3 Prembung arah Wadasi, Simpang 3 Kedungbener, Simpang 5 Kebulusan, Perlintasan rel KA Karanganyar, dan Simpang 3 Gombong arah Sempor, serta di lokasi strategis lainnya.

Dijelaskan, selama Februari 2021, terjadi 37 laka lantas dengan rincian 4 orang meninggal dunia, 43 orang mengalami luka-luka, serta kerugian material Rp 6.650.000. Menurut Iptu Tugiman, manusia atau pengemudi punya andil besar sebagai penyebab kecelakaan di jalan raya.

Penyebabnya bisa dari kondisi fisik dan mental, sikap berkendara, atau keterampilan mengemudi yang buruk.

"Faktor kendaraan juga turut menyumbang angka kecelakaan. Hal ini berhubungan dengan kondisi laik jalan kendaraan yang digunakan. Karena itu, kondisi kendaraan harus dicek secara berkala. Sparepart yang sudah tidak layak, seharusnya diperbaiki atau diganti," pungkasnya. (Suk)

Diserahkan, SK Penetapan Desa Wisata

MAGELANG (KR) - Bupati Magelang Zaenal Arifin menyerahkan Surat Keputusan (SK) tentang penetapan desa wisata di Kabupaten Magelang. Dalam hal ini, terdapat 9 desa yang menerima SK tersebut dalam rangka penguatan pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur.

Zaenal mengatakan, penyerahan SK penetapan desa wisata ini sesuai dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Magelang tahun 2014-2034. Selaras dengan misi pembangunan kepariwisataan daerah yakni 'Menjadikan Kabupaten Magelang Sebagai Kabupaten Wisata Kualitas Unggulan'. Pengembangan desa wisata di wilayah Kabupaten Magelang saat ini juga diarahkan untuk mendukung pengembangan Kawasan Strategi Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur.

Menurutnya, dalam situasi perekonomian di masa pandemi sekarang ini, perlu suatu tindakan nyata guna mendukung upaya pemberdayaan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, maju, dan mandiri. Desa wisata diciptakan disamping untuk pemberdayaan, juga untuk mengakomodir geliat wisatawan yang mengalami kejenuhan terhadap bentuk wisata modern dan hingar bingarnya keramaian kota.

"Saya yakin dengan mengunjungi Desa Wisata, para wisatawan dapat merasakan kehidupan di alam pedesaan, berinteraksi dengan masyarakat dan menikmati aktifitas sosial budaya," kata Zaenal dalam sambutannya pada acara penyerahan SK penetapan desa wisata di Rumah Dinas Bupati Magelang, Kamis (18/3).

Sementara, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Magelang, Ahmad Husein menjelaskan, dari bulan Januari-Maret 2021 pihaknya memberikan 9 SK desa wisata untuk mendorong pengembangan potensi pariwisata di tiap-tiap desa tersebut. (Bag)

PELARANGAN SENJATA NUKLIR

Dampaknya Luar Biasa Bagi Indonesia

SEMARANG (KR) - Fakultas Hukum dan Komunikasi (FHK) Unika Soegijapranata Semarang menggelar webinar tentang politik Hukum Indonesia bertema 'Pelarangan Senjata Nuklir di Indonesia', Rabu (17/3). Dekan FHK Unika Dr Marcella Elwina Simanjuntak SH CN saat membuka acara menyatakan webinar penting sebagai petunjuk dan arah kebijakan Indonesia menyangkut pelarangan nuklir di dunia, termasuk di Indonesia.

Tampil sebagai narasumber Kabid Interhum-Babinkum TNI Kolonel

Laut (KH) Wensulaus Kapo, Rolliansyah Soemirat (Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kemenlu RI), Drs Muhadi MA (Dosen FISIP-HI UGM), Dr Trihono Nalesti Dewi SH M-Hum (Dosen FHK Unika Soegijapranata) dan Adhiningtyas S Djatmiko SH LLM (ICRC).

Sejumlah poin dihasilkan melalui seminar ini diantaranya Indonesia tetap perlu terus menyuarakan ke seluruh dunia dan di dalam negeri terkait pelarangan penggunaan senjata nuklir, pengembangan dan pemanfaatannya un-

tuk perang. Bahkan Indonesia termasuk satu dari 50 negara dunia yang paling awal ikut menandatangani traktat non proliferasi nuklir, padahal Indonesia tidak memiliki senjata nuklir.

Poin lain seminar juga perlunya negara-negara ASEAN tetap menjaga kawasan ini senantiasa bebas dari senjata nuklir seperti selama ini terjadi sehingga kondisi aman dan damai selalu tercipta.

Selain itu webinar juga menyampaikan banyaknya negara di dunia yang masih memiliki senjata nuklir generasi baru

yang daya ledaknya jauh lebih dahsyat dibandingkan 2 bom nuklir yang pernah diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki tahun 1945 lalu yang membawa

bencana kemanusiaan luar biasa. Juga menyampaikan gambaran bencana akibat nuklir di Chernobyl, Fukuhima dan tempat lain di dunia. (Sgi)



Dekan FHK Unika Soegijapranata saat membuka webinar.